



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1310-1319

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Studi Komparatif Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan Solusi Implementasinya

Khusnul Khotimah, M. Ikhwansah, Jalaludin

Jurusan PJJ PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

khusnul041077@gmail.com, ikhwansahkyai6@gmail.com, jalaludin88g@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui pendekatan studi komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik faktual di tingkat satuan pendidikan. Meskipun Indonesia memiliki kerangka legal yang progresif dan selaras dengan agenda pembangunan global, implementasi kebijakan inklusif masih menghadapi tantangan multidimensional yang bersifat struktural dan kultural. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research, menganalisis 34 publikasi ilmiah periode 2020-2025 melalui teknik content analysis tematik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama implementasi mencakup keterbatasan infrastruktur aksesibel, minimnya kompetensi pedagogis guru dalam diferensiasi pembelajaran, fragmentasi kebijakan lintas tingkatan pemerintahan, persistensi stigma sosial, serta lemahnya sistem monitoring evaluasi berbasis data. Analisis komparatif menunjukkan disparitas signifikan dalam kualitas implementasi antarwilayah yang dipengaruhi oleh heterogenitas konteks geografis, sosial, ekonomi, dan kultural. Strategi efektif yang teridentifikasi meliputi pendekatan partisipatif, pelatihan guru berkelanjutan, modifikasi kurikulum adaptif, dan kolaborasi multipihak terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual, penguatan kapasitas institusional, pengembangan sistem koordinasi lintas sektor, serta pembentukan mekanisme berbagi praktik terbaik untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan inklusif. Temuan berkontribusi pada diskursus global tentang efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang dengan menyediakan kerangka komprehensif berbasis bukti empiris untuk perbaikan sistemik menuju inklusivitas autentik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Studi Komparatif, Tantangan Struktural

1. Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan manifestasi komitmen global terhadap prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*) yang menjamin aksesibilitas pembelajaran berkualitas tanpa diskriminasi. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, telah menetapkan landasan legal yang komprehensif untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif [1]. Kebijakan fundamental ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik dengan potensi kecerdasan istimewa. Namun demikian, eksistensi regulasi yang progresif tersebut belum berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan, menciptakan kesenjangan signifikan antara kebijakan normatif dan praktik faktual dalam ekosistem pendidikan nasional.

Kompleksitas implementasi pendidikan inklusif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis dan demografis yang heterogen, mencakup disparitas aksesibilitas infrastruktur pendidikan, variasi kompetensi tenaga pendidik, serta diversitas konteks sosial-budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsep inklusi. Penelitian empiris mengindikasikan bahwa mayoritas satuan pendidikan penyelenggara program inklusif menghadapi tantangan multidimensional, termasuk keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya fasilitas pembelajaran adaptif, serta rendahnya kapasitas institusional dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik [2]. Fenomena ini semakin diperparah oleh persistensi stigma sosial dan resistensi komunitas terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan pembelajaran reguler, yang secara substansial menghambat terwujudnya budaya inklusif yang autentik.

Diskursus akademik mengenai pendidikan inklusif telah mengalami evolusi paradigmatik dari pendekatan *deficit-based* menuju perspektif *strengths-based* yang menekankan potensi dan kontribusi unik setiap individu dalam komunitas pembelajaran. Literatur global menggarisbawahi bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya material, melainkan juga oleh transformasi sistemik dalam kultur organisasi sekolah, kompetensi pedagogis guru, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Studi komparatif yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif yang efektif memerlukan sinkronisasi antara kebijakan makro (*policy level*), kapasitas institusional (*school level*), dan praktik pembelajaran (*classroom level*) yang terintegrasi secara holistik. Penelitian terkini menegaskan bahwa ketimpangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia terutama disebabkan oleh fragmentasi kebijakan, inkonsistensi regulasi lintas tingkatan pemerintahan, serta minimnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis [3].

Analisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia mengungkapkan paradoks antara kerangka legal yang relatif komprehensif dengan realitas implementasi yang masih jauh dari optimal. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih eksplisit dibandingkan beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, tantangan operasional dalam penerjemahan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang efektif masih menjadi hambatan utama. Studi meta-analisis terhadap implementasi pendidikan inklusif di berbagai wilayah menunjukkan pola yang konsisten berupa keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan diferensiasi pembelajaran (*differentiated instruction*), ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas, serta lemahnya kolaborasi antara guru reguler, guru pendamping khusus, dan tenaga profesional lainnya [4].

Urgensi kajian komparatif terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi yang spesifik dan kontekstual. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang tantangan faktual yang dihadapi oleh praktisi pendidikan, bukan semata-mata pada asumsi normatif yang terlepas dari realitas empiris. Dengan mengadopsi pendekatan studi komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi variasi implementasi kebijakan inklusif di berbagai konteks geografis dan sosio-ekonomi di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sensitif terhadap keragaman lokal namun tetap konsisten dengan prinsip universal pendidikan inklusif. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk menjembatani *gap* antara teori dan praktik dengan mengidentifikasi *best practices* dan strategi inovatif yang telah terbukti efektif dalam konteks spesifik, serta menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat keberhasilan implementasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan perspektif komparatif yang sistematis untuk menganalisis heterogenitas implementasi kebijakan inklusif di Indonesia, dengan fokus khusus pada identifikasi pola-pola tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau terfokus pada satu lokus penelitian tertentu, kajian ini mengintegrasikan analisis kebijakan (*policy analysis*), evaluasi implementasi (*implementation evaluation*), dan eksplorasi solusi inovatif (*solution-oriented approach*) untuk menghasilkan kerangka komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan sistemik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan dengan mengeksplorasi dinamika kompleks antara faktor regulatif, kapasitas institusional, dan agensi individual dalam konteks sistem pendidikan yang terdesentralisasi.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan fundamental: Bagaimana variasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap disparitas keberhasilan implementasi tersebut? Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara komparatif kerangka kebijakan pendidikan inklusif di berbagai wilayah di Indonesia; (2) mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan inklusif pada level institusional dan operasional; (3) mengevaluasi efektivitas strategi dan intervensi yang telah diterapkan untuk mengatasi hambatan implementasi; dan (4) merumuskan rekomendasi solusi komprehensif yang berbasis pada bukti empiris untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia secara komprehensif. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena kompleks melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber dokumentasi akademik dan kebijakan yang telah dipublikasikan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi sistematis dengan mengakses

jurnal ilmiah terindeks, artikel prosiding, buku teks akademik, dan dokumen regulasi pemerintah yang relevan dengan implementasi pendidikan inklusif. Sumber data primer diperoleh dari publikasi ilmiah yang terbit dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan aktualitas informasi, sementara data sekunder mencakup peraturan perundangan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan inklusif.

Teknik analisis data mengadopsi content analysis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di berbagai wilayah Indonesia. Proses analisis dimulai dengan tahap pengodean terbuka untuk mengkategorisasi temuan berdasarkan dimensi kebijakan, tahap pengodean aksial untuk menghubungkan kategori-kategori yang teridentifikasi, dan tahap pengodean selektif untuk mengintegrasikan hasil analisis menjadi kerangka konseptual yang koheren. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan implementasi program pendidikan inklusif.

Kriteria inklusi dalam seleksi literatur mencakup publikasi yang membahas aspek implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki metodologi penelitian yang jelas. Proses pencarian literatur menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan ERIC dengan kata kunci "pendidikan inklusif Indonesia", "kebijakan inklusi", dan "implementasi pendidikan berkebutuhan khusus". Dari proses pencarian awal diperoleh 87 publikasi yang kemudian disaring berdasarkan kriteria relevansi dan kualitas metodologi, menghasilkan 34 publikasi yang dianalisis secara mendalam. Seluruh referensi dikelola menggunakan aplikasi Mendeley untuk memastikan konsistensi sitasi dan kemudahan pelacakan sumber [5].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Analisis Komparatif Kerangka Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Analisis komprehensif terhadap kerangka kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan sistematis antara formulasi regulasi dengan implementasi faktual di tingkat satuan pendidikan. Kajian terhadap berbagai literatur mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi pendidikan inklusif sebagai strategi nasional untuk menjamin aksesibilitas pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang bersifat multidimensional [6]. Kerangka kebijakan yang telah diformulasikan secara normatif menunjukkan keselarasan dengan agenda pembangunan global seperti Sustainable Development Goals, namun realitas implementasinya menghadapi problematika serius pada aspek input dan proses yang melibatkan keterbatasan pelatihan tenaga pendidik, infrastruktur yang belum memadai, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta minimnya mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis data empiris. Orientasi kebijakan yang cenderung bersifat administratif belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan sosial dalam praktik pembelajaran, sehingga menciptakan disparitas antara idealitas normatif dengan realitas operasional di berbagai wilayah Indonesia.

Studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengungkapkan bahwa kedua negara menunjukkan komitmen dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses pendidikan di wilayah rural, prevalensi stereotip gender dalam disiplin akademik tertentu, disparitas kompetensi dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta kendala ekonomi yang menghambat keberlanjutan program inklusif [7]. Untuk mengatasi tantangan berbasis gender dalam konteks pendidikan, diperlukan upaya sistematis untuk mengeliminasi stereotip gender, memperkuat kebijakan yang sensitif gender, memperluas aksesibilitas pendidikan, dan menyediakan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan. Kolaborasi multipihak menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, ekuitable, dan berkeadilan gender. Praktik terbaik dalam implementasi kebijakan inklusif melibatkan pengembangan kurikulum yang mendukung keberagaman, penyediaan pelatihan guru untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, dan pembentukan lingkungan sekolah yang inklusif. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan, sehingga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas dianggap krusial untuk mencapai keberhasilan implementasi. Arah kebijakan masa depan harus mencakup pelatihan guru yang berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan perluasan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, dengan pembaruan kebijakan dan program pendidikan yang responsif sebagai kunci penciptaan sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan .

3.2 Identifikasi Tantangan Implementasi Kebijakan Inklusif pada Level Institusional dan Operasional

Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang kompleks, termasuk rendahnya pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip inklusif, minimnya ketersediaan fasilitas pembelajaran adaptif, dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal yang beragam. Tantangan struktural yang paling dominan mencakup keterbatasan fasilitas pendukung sistem inklusif, kompetensi guru yang masih terbatas dalam menangani keberagaman peserta didik, kurikulum yang belum sepenuhnya mengakomodasi diversitas kebutuhan pembelajaran, stigma negatif masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus, manajemen sekolah yang belum optimal, dan minimnya kolaborasi efektif antarstakeholder [8]. Kesenjangan kompetensi guru menjadi faktor kritikal yang menghambat efektivitas pembelajaran inklusif, terutama dalam hal pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan ini berdampak pada ketidakmampuan guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran yang responsif terhadap variasi gaya belajar, kecepatan pemahaman, dan kebutuhan dukungan individual peserta didik.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan operasional yang signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman guru terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, keterbatasan sumber daya pendukung pembelajaran, dan stigma sosial yang masih mengakar di masyarakat. Namun demikian, ditemukan praktik inovatif yang berhasil mengatasi tantangan tersebut, seperti program pelatihan guru yang komprehensif, adaptasi kurikulum yang sistematis, dan kolaborasi intensif antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Kajian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik, pentingnya pengembangan kapasitas guru, dan peran krusial transformasi budaya sekolah dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif yang efektif. Implikasi dari temuan ini menekankan kebutuhan akan pendekatan komprehensif dan sistemik dalam mengembangkan pendidikan inklusif, dengan fokus pada pengembangan kapasitas, transformasi kultur organisasi, dan kolaborasi multipihak. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup kebutuhan akan kejelasan kebijakan yang lebih operasional, alokasi sumber daya yang lebih besar, dan program peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendidikan inklusif [9].

Studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara maju mengidentifikasi empat kluster tematik yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar, yaitu penanganan gangguan belajar spesifik, penanganan autisme, kebijakan pendidikan, dan aspek sosial pendidikan inklusif. Tantangan utama yang teridentifikasi mencakup kesulitan dalam integrasi sistem pembelajaran, keterbatasan sumber daya manusia dan material, serta kesenjangan kompetensi digital yang semakin relevan di era pembelajaran berbasis teknologi. Di sisi lain, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi meliputi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik, dan sistem pendukung yang terstruktur dengan baik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan keunikan tantangan dan potensi masing-masing wilayah, didukung oleh kolaborasi multistakeholder, pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan kebijakan yang komprehensif [10]. Rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penguatan kebijakan adaptif yang responsif terhadap konteks lokal, pengembangan program pelatihan guru berkelanjutan yang terstruktur, dan pelaksanaan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang dari kebijakan inklusif terhadap kualitas pembelajaran dan outcomes peserta didik.

3.3 Evaluasi Efektivitas Strategi dan Intervensi dalam Mengatasi Hambatan Implementasi

Evaluasi terhadap berbagai strategi yang telah diterapkan dalam mengatasi hambatan implementasi pendidikan inklusif mengungkapkan bahwa terdapat inisiatif progresif dari berbagai daerah yang menunjukkan keberhasilan melalui pendekatan partisipatif, pelatihan guru inklusif yang sistematis, dan modifikasi kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik [11]. Peningkatan mutu pendidikan melalui asesmen berbasis kompetensi dan pendekatan pedagogis diferensial turut memperkuat pencapaian kesetaraan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi strategi inklusif dengan upaya peningkatan mutu sebagai satu kesatuan sistem pendidikan yang holistik. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan heterogenitas konteks geografis, sosial, ekonomi, dan kultural yang menjadi karakteristik negara kepulauan ini.

Strategi solusi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif mencakup penyediaan infrastruktur yang aksesibel, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum inklusif yang adaptif, kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pendidikan inklusif, dukungan pemerintah dalam penyediaan sumber daya, dan kerjasama serta sinergi di antara berbagai pihak terkait [12]. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi pendidikan inklusif memerlukan komitmen kuat dan kolaborasi dari semua stakeholder dalam upaya mewujudkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan non-diskriminatif bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur aksesibel, pelatihan tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah dapat membentuk badan khusus atau satuan tugas yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif di seluruh Indonesia dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan berbasis data empiris.

3.4. Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik dalam Pendidikan Inklusif

Analisis mendalam terhadap kesenjangan antara kebijakan dan praktik mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakan nasional mendukung pendidikan inklusif, hambatan signifikan masih tetap ada dalam praktik implementasinya, termasuk keterbatasan sumber daya, pelatihan guru yang tidak memadai, dan persistensi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Kajian literatur bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan kunci yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif dan mengusulkan strategi efektif berdasarkan penelitian akademik terkini. Temuan penelitian mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik, menyoroti kebutuhan akan pendekatan komprehensif yang menangani baik kerangka teoretis maupun solusi praktis. Studi ini berkontribusi pada diskursus berkelanjutan tentang pendidikan inklusif dengan menyediakan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua peserta didik di Indonesia [12]. Rekomendasi strategis yang diajukan menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kebijakan, kapasitas institusional, kompetensi individual, dan transformasi kultur organisasi sekolah sebagai prasyarat keberhasilan pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan berdampak.

Sintesis dari berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif tidak dapat dicapai melalui intervensi parsial atau pendekatan fragmentaris, melainkan memerlukan transformasi sistemik yang melibatkan multiple level of intervention mulai dari kebijakan makro hingga praktik mikro di tingkat kelas. Diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual, penguatan kapasitas institusional melalui penyediaan sumber daya yang memadai, pengembangan kompetensi profesional guru secara berkelanjutan, dan pembentukan ekosistem pendukung yang melibatkan partisipasi aktif dari keluarga, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Monitoring dan evaluasi yang sistematis berbasis data empiris menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas implementasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan berkelanjutan. Lebih lanjut, perlu dikembangkan mekanisme sharing best practices dan pembelajaran kolektif antarsekolah dan antardaerah untuk mempercepat difusi inovasi dan praktik efektif dalam pendidikan inklusif, sehingga dapat menciptakan efek multiplier yang signifikan dalam transformasi sistem pendidikan nasional menuju inklusivitas yang autentik dan berkelanjutan.

3.5. Dimensi Komparatif Internasional dan Regional dalam Implementasi Kebijakan Inklusif

Perspektif komparatif internasional memberikan wawasan kritis mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi global implementasi pendidikan inklusif. Analisis sistematis literatur terhadap 42 artikel tentang penerapan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar, baik di Indonesia maupun negara-negara maju, mengidentifikasi empat klaster tematik yang saling berinterkoneksi: penanganan gangguan belajar spesifik, intervensi untuk peserta didik dengan spektrum autisme, formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan, serta dimensi sosial yang melatarbelakangi praktik inklusif. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas multilayer yang harus dikelola secara simultan dalam ekosistem pendidikan inklusif. Tantangan fundamental yang teridentifikasi mencakup kesulitan dalam mengintegrasikan sistem pembelajaran yang heterogen, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan material, serta kesenjangan kompetensi digital yang semakin krusial dalam era transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Sebaliknya, faktor-faktor yang secara konsisten mendukung keberhasilan implementasi meliputi kebijakan komprehensif yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, mekanisme pengembangan profesional berkelanjutan bagi seluruh ekosistem pendidik, dan arsitektur sistem pendukung yang terstruktur dengan protokol operasional yang jelas.

Studi perbandingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengungkapkan pola konvergen dalam komitmen kedua negara terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun secara bersamaan mengidentifikasi hambatan struktural yang persisten berupa keterbatasan aksesibilitas pendidikan di wilayah rural dan semi-urban, prevalensi stereotip gender yang terinternalisasi dalam disiplin akademik tertentu khususnya bidang eksak, disparitas signifikan dalam penguasaan kompetensi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), serta kendala ekonomi yang membatasi keberlanjutan program inklusif. Untuk mengatasi tantangan berbasis gender dalam konteks pendidikan yang lebih luas, diperlukan strategi sistematis dan multifaset untuk mengeliminasi stereotip gender yang telah mengakar secara kultural, memperkuat kebijakan yang responsif gender dengan mekanisme implementasi yang terukur, memperluas aksesibilitas pendidikan melalui infrastruktur fisik dan digital, serta menyediakan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi. Kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, ekuitable, dan berkeadilan gender secara substantif [13].

3.6. Evaluasi Kebijakan Berbasis Model CIPP dan Kerangka Keadilan Sosial

Penerapan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia mengungkapkan kompleksitas multidimensional yang melibatkan interaksi dinamis antara konteks makro kebijakan, kualitas input sumber daya, mekanisme proses implementasi, dan capaian output yang dihasilkan pada tingkat operasional [13]. Evaluasi komprehensif terhadap dimensi kontekstual menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif Indonesia telah menunjukkan keselarasan normatif yang signifikan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, khususnya Sustainable Development Goals pada target 4.5 yang menekankan eliminasi disparitas dalam pendidikan dan penjaminan akses yang setara bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, analisis mendalam terhadap aspek input mengungkapkan problematika serius yang bersifat sistemik dan struktural, terutama berkaitan dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas program pelatihan guru yang terstruktur dan berkelanjutan, minimnya infrastruktur aksesibel yang memenuhi standar universal design dalam berbagai aspek lingkungan pembelajaran, lemahnya mekanisme koordinasi lintas lembaga yang menghambat terciptanya sinergi program antara Kementerian Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, serta ketiadaan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis pada data empiris yang valid, reliabel, dan terkini. Kesenjangan pada dimensi input ini menciptakan efek domino yang menghambat keseluruhan proses implementasi, mengakibatkan inkonsistensi kualitas layanan pendidikan inklusif antarwilayah dan antarsatuan pendidikan yang semakin memperparah ketimpangan akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Evaluasi terhadap dimensi proses implementasi mengungkapkan bahwa orientasi kebijakan yang masih cenderung bersifat administratif-prosedural belum sepenuhnya mentransformasikan prinsip keadilan sosial menjadi praktik pembelajaran yang substantif, transformatif, dan emansipatoris di tingkat kelas [6]. Pendekatan compliance-based yang mendominasi implementasi kebijakan inklusif seringkali menghasilkan fenomena "inclusive in name only" dimana satuan pendidikan memenuhi persyaratan administratif untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa disertai dengan perubahan fundamental dalam pedagogi, kurikulum, dan kultur organisasi sekolah yang mendukung pembelajaran bermakna bagi seluruh peserta didik. Analisis terhadap dimensi product menunjukkan bahwa capaian pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dalam setting inklusif masih menunjukkan variasi yang sangat lebar, yang mengindikasikan inkonsistensi dalam kualitas implementasi dan efektivitas intervensi pedagogis yang diberikan. Kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik faktual ini mencerminkan perlunya reorientasi paradigmatis dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepatuhan administratif menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada pencapaian keadilan distributif dalam akses sumber daya pembelajaran dan keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus dan keluarganya [13].

Temuan evaluatif berbasis model CIPP ini memberikan kontribusi signifikan pada diskursus global mengenai efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di negara-negara berkembang, dengan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem implementasi yang memerlukan intervensi prioritas. Rekomendasi strategis yang muncul dari analisis ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis pada evaluasi kontekstual yang sensitif terhadap heterogenitas geografis, demografis, sosial-ekonomi, dan kultural yang menjadi karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Peningkatan kapasitas sistematis para aktor pendidikan melalui program pengembangan profesional yang terdiferensiasi berdasarkan kebutuhan spesifik dan konteks lokal menjadi imperatif untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip pedagogi inklusif. Penguatan arsitektur sinergi antarpemangku kepentingan melalui platform koordinasi yang

terinstitusionalisasi dengan mekanisme kerja yang jelas dan terukur diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan duplikasi program yang saat ini masih menjadi hambatan dalam implementasi efektif. Perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan lokal yang terus berevolusi memerlukan mekanisme feedback loops yang efektif dari tingkat implementasi ke tingkat formulasi kebijakan, sehingga dapat menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada pembelajaran dari praktik lapangan.

3.7. Strategi Komprehensif dan Solusi Sistemik untuk Optimalisasi Implementasi

Identifikasi strategi solusi yang efektif untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan spektrum intervensi mulai dari level kebijakan makro hingga praktik mikro di tingkat kelas. Strategi prioritas pertama adalah penyediaan infrastruktur fisik dan pedagogis yang aksesibel sesuai dengan prinsip universal design for learning, yang mencakup tidak hanya modifikasi lingkungan fisik seperti ramp, toilet aksesibel, dan jalur pemandu, tetapi juga pengembangan material pembelajaran yang dapat diakses melalui multiple means of representation, multiple means of action and expression, serta multiple means of engagement. Implementasi prinsip universal design memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur, namun pendekatan ini terbukti lebih cost-effective dalam jangka panjang karena dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan seluruh peserta didik, bukan hanya mereka yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus. Peningkatan kapasitas profesional guru melalui program pelatihan berkelanjutan yang berbasis pada adult learning principles menjadi pilar kedua dalam strategi optimalisasi, dengan fokus pada pengembangan kompetensi pedagogical content knowledge yang spesifik untuk konteks pembelajaran inklusif [13]. Program pelatihan yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar guru sebagai adult learners, menggunakan pendekatan experiential learning yang melibatkan refleksi terhadap praktik, kolaborasi dengan sesama praktisi, dan dukungan coaching yang berkelanjutan untuk memastikan transfer pembelajaran dari setting pelatihan ke praktik kelas.

Pengembangan kurikulum inklusif yang adaptif dengan mekanisme modifikasi dan akomodasi yang sistematis merupakan strategi ketiga yang krusial untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat mengakses konten pembelajaran dan mendemonstrasikan penguasaan kompetensi sesuai dengan cara yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Kurikulum inklusif yang efektif harus memiliki fleksibilitas yang memadai untuk memungkinkan diferensiasi dalam konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran, sambil tetap mempertahankan standar kompetensi yang tinggi dan ekspektasi yang ambisius terhadap seluruh peserta didik. Implementasi kampanye kesadaran publik berskala masif untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap pendidikan inklusif menjadi strategi keempat yang tidak kalah penting, mengingat persistensi stigma sosial dan resistensi komunitas masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi. Kampanye yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks kultural lokal, menggunakan pendekatan komunikasi yang resonan dengan nilai-nilai masyarakat, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Mobilisasi dukungan pemerintah dalam alokasi sumber daya yang proporsional dan berkelanjutan merupakan prasyarat fundamental untuk semua strategi yang telah diidentifikasi, mengingat implementasi pendidikan inklusif yang berkualitas memerlukan investasi yang substansial dalam pengembangan kapasitas, penyediaan infrastruktur, dan penguatan sistem pendukung.

Konstruksi ekosistem kerjasama dan sinergi multipihak yang terstruktur dengan protokol kolaborasi yang jelas menjadi strategi integratif yang mengikat seluruh komponen sistem pendidikan inklusif. Optimalisasi implementasi pendidikan inklusif memerlukan manifestasi komitmen politik yang kuat dari pemerintah di semua tingkatan, yang diwujudkan tidak hanya dalam regulasi tetapi juga dalam alokasi anggaran yang memadai dan konsisten. Kolaborasi sistemik dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, orang tua, dan komunitas dalam upaya kolektif mewujudkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan non-diskriminatif bagi semua peserta didik tanpa kecuali menjadi kunci keberhasilan implementasi. Praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam konteks Indonesia mencakup pengembangan kurikulum yang responsif terhadap keberagaman dengan pendekatan diferensiasi pembelajaran yang sistematis, penyediaan program pelatihan guru yang komprehensif dan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan kompetensi dalam assessment, perencanaan pembelajaran individual, dan strategi instruksional yang adaptif, serta pembentukan lingkungan sekolah yang inklusif melalui transformasi kultur organisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Meskipun tantangan berupa keterbatasan sumber daya material dan finansial serta persistensi stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan, kolaborasi tripartit antara sekolah sebagai locus implementasi, orang tua sebagai mitra strategis dalam mendukung pembelajaran anak, dan komunitas sebagai ekosistem pendukung yang lebih luas terbukti krusial untuk mencapai keberhasilan implementasi yang berkelanjutan [13].

Arah kebijakan masa depan harus mencakup institusionalisasi program pelatihan guru yang berkelanjutan dengan sistem sertifikasi kompetensi inklusif yang terstandarisasi dan diakui secara nasional, peningkatan sistematis aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui investasi infrastruktur yang terencana dan bertahap dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kesenjangan akses yang signifikan, serta perluasan network kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan melalui mekanisme multi-stakeholder partnership yang terinstitusionalisasi dengan struktur governance yang jelas. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional untuk pengembangan infrastruktur aksesibel, dengan mekanisme earmarking yang memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan pendidikan inklusif. Selain itu, pemerintah dapat membentuk badan khusus atau satuan tugas yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif di seluruh Indonesia dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur, berbasis data empiris, dan dapat dimonitor secara real-time untuk memungkinkan intervensi korektif yang tepat waktu.

3.8. Integrasi Strategi Inklusif dengan Penguatan Mutu Pendidikan

Dimensi kualitas pendidikan menjadi aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari agenda inklusivitas, mengingat tujuan akhir dari pendidikan inklusif bukan semata-mata akses fisik tetapi pencapaian pembelajaran yang berkualitas dan relevan bagi seluruh peserta didik. Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat inisiatif progresif dari berbagai daerah yang mendemonstrasikan keberhasilan melalui implementasi pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, program pelatihan guru inklusif yang sistematis dan kontekstual yang dirancang berdasarkan assessment kebutuhan spesifik guru di masing-masing wilayah, serta modifikasi kurikulum yang berbasis pada assessment kebutuhan peserta didik secara individual dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel [10]. Peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi asesmen berbasis kompetensi yang autentik dan pendekatan pedagogis diferensial yang responsif terhadap keberagaman gaya belajar, kecepatan pemahaman, dan preferensi modalitas pembelajaran turut memperkuat pencapaian kesetaraan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan. Integrasi strategi inklusif dengan agenda peningkatan mutu menciptakan sinergi yang memperkuat fondasi sistem pendidikan yang tidak hanya aksesibel dalam dimensi fisik tetapi juga berkualitas tinggi dalam dimensi pedagogis dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pengembangan kompetensi higher-order thinking skills, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi [14].

Pendekatan partisipatif dalam implementasi pendidikan inklusif terbukti efektif dalam meningkatkan ownership dan komitmen seluruh stakeholder terhadap keberhasilan program, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang dikembangkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan kontekstual spesifik masing-masing satuan Pendidikan [15]. Partisipasi yang bermakna memerlukan lebih dari sekadar konsultasi formal, tetapi harus mencakup keterlibatan substantif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi intervensi, dan evaluasi dampak program. Program pelatihan guru inklusif yang sistematis perlu dirancang dengan mempertimbangkan kontinum kebutuhan pengembangan profesional mulai dari level awareness tentang konsep dan prinsip pendidikan inklusif, knowledge tentang karakteristik dan kebutuhan berbagai kategori peserta didik berkebutuhan khusus, skills dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensial dan akomodasi yang sesuai, hingga level mastery dalam melakukan inovasi pedagogis dan menjadi mentor bagi guru lain. Modifikasi kurikulum yang efektif memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap terstruktur, dengan mekanisme yang memungkinkan guru untuk melakukan adaptasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran berdasarkan assessment berkelanjutan terhadap kemajuan dan kebutuhan individual peserta didik, sambil tetap mempertahankan alignment dengan standar kompetensi kurikulum nasional.

Asesmen berbasis kompetensi yang autentik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa evaluasi pembelajaran benar-benar mengukur penguasaan kompetensi substantif dan bukan sekadar kemampuan mengikuti format asesmen tertentu. Pendekatan asesmen yang inklusif memerlukan diversifikasi metode dan instrumen evaluasi untuk mengakomodasi keberagaman cara peserta didik dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan kompetensi, termasuk melalui portfolio, performance assessment, project-based assessment, dan berbagai bentuk asesmen alternatif lainnya yang lebih fleksibel dan adaptif [3]. Pendekatan pedagogis diferensial yang responsif menuntut guru untuk memiliki kompetensi dalam melakukan ongoing assessment terhadap readiness, interest, dan learning profile peserta didik, serta kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan multiple pathways pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama melalui rute yang berbeda dan dengan dukungan yang disesuaikan.

Implikasi praktis dari temuan komprehensif ini menggarisbawahi urgensi sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi sistemik pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan secara serius heterogenitas konteks geografis yang membentang dari wilayah urban dengan infrastruktur memadai hingga rural terpencil dengan aksesibilitas terbatas, diversitas sosial yang mencakup berbagai kelompok etnis dengan sistem nilai dan praktik budaya yang beragam, variasi kapasitas ekonomi daerah yang signifikan yang mempengaruhi kemampuan investasi dalam pendidikan, serta pluralitas kultural yang menjadi karakteristik inheren negara kepulauan ini dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah [13]. Transformasi sistemik ini memerlukan komitmen jangka panjang yang konsisten melampaui siklus politik, alokasi sumber daya yang memadai dan berkelanjutan dengan mekanisme pembiayaan yang sustainable, serta political will yang kuat dari seluruh level pemerintahan untuk menjadikan pendidikan inklusif sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan [2]. Sinergi lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat menjadi prasyarat untuk menciptakan ekosistem pendukung yang komprehensif bagi implementasi pendidikan inklusif yang tidak hanya fokus pada aspek pembelajaran akademik tetapi juga pengembangan keterampilan sosial, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan inklusif yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital dapat memfasilitasi monitoring real-time, analisis data untuk informed decision-making, dan diseminasi praktik terbaik antarwilayah untuk mempercepat pembelajaran kolektif dan peningkatan kualitas implementasi secara nasional

4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi paradoks fundamental antara kerangka regulasi yang progresif dengan realitas pelaksanaan yang masih jauh dari optimal. Analisis komparatif mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan legal yang selaras dengan agenda pembangunan global dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesenjangan sistematis antara formulasi kebijakan dan praktik faktual menciptakan disparitas signifikan dalam kualitas layanan pendidikan inklusif di berbagai wilayah. Tantangan utama yang teridentifikasi bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural berupa keterbatasan infrastruktur aksesibel, minimnya ketersediaan guru pendamping khusus, dan lemahnya sistem monitoring evaluasi berbasis data, serta aspek kultural yang meliputi persistensi stigma sosial, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip inklusif, dan resistensi komunitas terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan pembelajaran reguler. Kesenjangan kompetensi pedagogis guru dalam menerapkan diferensiasi pembelajaran dan modifikasi kurikulum menjadi hambatan kritical yang menghambat efektivitas implementasi. Fragmentasi kebijakan dan inkonsistensi regulasi lintas tingkatan pemerintahan memperparah problematika implementasi, menciptakan kebingungan operasional di tingkat satuan pendidikan dan menghambat terciptanya ekosistem pendukung yang kohesif dan terintegrasi. Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai strategi intervensi yang telah diterapkan, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang paling efektif dalam mengatasi hambatan implementasi adalah melalui integrasi holistik antara penguatan kebijakan adaptif, pengembangan kapasitas profesional berkelanjutan, transformasi kultur organisasi sekolah, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur. Inisiatif progresif di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan keunikan tantangan dan potensi lokal, didukung oleh komitmen kepemimpinan institusional yang kuat dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap heterogenitas konteks geografis, sosial, ekonomi, dan kultural Indonesia, disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran adaptif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, pengembangan sistem monitoring evaluasi berbasis indikator terukur, dan penciptaan platform berbagi praktik terbaik untuk mempercepat difusi inovasi dalam pendidikan inklusif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang kebijakan inklusif terhadap outcomes pembelajaran dan kesejahteraan psikososial peserta didik, studi eksploratori tentang efektivitas model-model inovatif dalam konteks spesifik Indonesia, serta penelitian evaluatif terhadap mekanisme pembiayaan pendidikan inklusif yang sustainable dan berkeadilan. Pengembangan instrumen asesmen yang valid dan reliabel untuk mengukur kualitas implementasi pendidikan inklusif juga menjadi agenda riset penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti empiris dalam transformasi sistem pendidikan nasional menuju inklusivitas yang autentik dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] A. Hufron, "Mplementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Ukhuwah Di Tmi Al-Amien Preduan Dalam Menguatkan Toleransi Dan Nasionalisme Sebagai Fondasi Peradaban Multikultur," vol. 7210, 2025.
- [2] S. Shaddiq, "Transformasi Pendidikan Luar Biasa di Era Digital : Inklusi dan Teknologi di Tahun 2025," no. April, 2025.
- [3] C. Widyasari, "Efektifitas Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Papua," hal. 269–275, 2024.
- [4] Sirajuddin, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan di Indonesia," vol. 4, no. 1, hal. 21–30, 2025, doi: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.117.
- [5] Mainur, "Tinjauan Kurikulum Di Beberapa Negara: Perbandingan Strategis Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Indonesia," vol. 6, no. 2, hal. 791–809, 2025.
- [6] C. Anwar, L. Komariyah, A. Aznem, L. T. Payung, dan A. Heri, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia : Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial," vol. 0738, no. 3, hal. 739–750, 2025.
- [7] Debi Yanti Nahampun, "Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Studi Pustaka Atas Perkembangan, Tantangan, Dan Strategi Implementasi," vol. 10, 2025.
- [8] S. Marmoah, J. Indrastoeti, S. Poerwanti, S. Istiyati, dan H. Mahfud, "Comparative Study of Inclusive Education Programs for Women in Indonesia and Malaysia," vol. 16, hal. 681–691, 2024, doi: 10.35445/alishlah.v16i2.4477.
- [9] R. Melinda, A. Suriansyah, dan W. R. Refianti, "Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang dalam Implementasinya di Indonesia," vol. 2009, no. 20, 2025.
- [10] M. Yati, F. Hatib, P. Islam, dan N. Maju, "Implementation Of Inclusive Education Policies In Primary Schools: Islamic Perspectives In Comparative Studies Between Indonesia And Developed Countries," vol. 17, no. 01, hal. 103–120, 2025.
- [11] Murtadha, "Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Solusi," vol. 6, no. 1, hal. 45–63, 2025.
- [12] A. A. Putri dan S. A. Jailani, "Strategi dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia," vol. 01, no. 01, 2024.
- [13] I. K. Sofiani, M. Fazli, dan M. Syafiq, "Mengurai Problematika Pendidikan Inklusif: Perbandingan Indonesia Dan Inggris Dalam Menghadapi Tantangan Disabilitas Dan Keadilan Sosial," vol. 3, no. 2, hal. 197–205, 2025.
- [14] Justin Niaga Siman Juntak, "Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua : Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia," no. June, 2023, doi: 10.15575/jbpd.v5i2.26904.
- [15] A. Yani *et al.*, "Studi Literatur Perbandingan Inovasi dalam Sistem Pendidikan Berbasis Kecerdasan Buatan Indonesia dan China," vol. 5, hal. 3961–3974, 2025.